

**TAHUN  
2019**



## LAPORAN KEUANGAN BPBD DIY



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan Kenari No. 14 A Yogyakarta

Telp. 0274-555836 Fax. 0274-555842

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, kami atas nama BPBD DIY menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019. Laporan Keuangan BPBD DIY Tahun Anggaran 2019 disusun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 99 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 2(dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Secara singkat Laporan Keuangan BPBD DIY Tahun Anggaran 2019 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

### 1. LAPORAN REALISASI APBD

Laporan Realisasi APBD menggambarkan perbandingan antara APBD Tahun Anggaran 2019 dengan realisasi yang mencakup unsur unsur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut :

A. Pendapatan ditetapkan sebesar	Rp0,00
Realisasinya mencapai sebesar	Rp0,00
Sehingga kurang dari target sebesar	Rp0,00
Atau sebesar 0,00%	
B. Belanja ditetapkan sebesar	Rp92.572.899.632,00
Realisasinya mencapai sebesar	Rp78.121.366.874,00
Sehingga kurang dari target sebesar	Rp14.451.532.758,00
Atau sebesar 15,61%	

C. Surplus/Defisit Anggaran ditetapkan defisit sebesar Rp78.121.366.874,00 dengan realisasi defisit sebesar Rp78.121.366.874,00 atau sebesar 84,39%

## 2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan BPBD DIY mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana pada 31 Desember 2019.

Jumlah Aset 31 Desember 2019 sebesar	Rp72.042.308.192,58
Yang terdiri dari Aset Lancar sebesar	Rp 223.759.000,00
Investasi Jangka Panjang sebesar	Rp 0,00
Aset tetap sebesar	Rp71.539.474.192,58
Dana Cadangan sebesar	Rp 0,00
Dan Aset lainnya sebesar	Rp 279.075.000,00
Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2019 sebesar	Rp 32.605.057,00
Yang terdiri dari Kewajiban jangka pendek sebesar	Rp 32.605.057,00
serta dari Kewajiban jangka panjang sebesar	Rp 0,00
Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar	Rp72.009.703.135,58

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber data ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh BPBD DIY untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan terdiri dari Pendapatan-LO, beban, Transfer dan Pos pos Luar Biasa, dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan LO terdiri dari :

Pendapatan Asli Daerah LO	Rp0,00
Pendapatan Transfer LO	Rp0,00
Lain lain Pendapatan yang sah LO	Rp0,00

Beban terdiri dari :

Beban Operasi	Rp26.895.680.299,43
Surplus/Defisit Operasional	(Rp26.895.680.299,43)
Surplus Laporan Operasional	(Rp26.895.680.299,43)

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

Ekuitas Awal	Rp20.751.474.897,01
Surplus Laporan Operasional	Rp(26.895.680.299,43)
RK PPKD	Rp.78.121.366.874,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar	Rp32.541.664,00
Ekuitas Akhir	Rp72.009.703.135,58

### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) menguraikan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, kondisi ekonomi makro,

kebijakan keuangan, kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai serta peristiwa penting setelah tanggal pelaporan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan LRA, belanja dan pembiayaan menggunakan basis kas yaitu pada saat diterima dan dikeluarkan oleh dan dari kas daerah. Sementara dalam penyajian Neraca dan Laporan Operasional pengakuan Aset, kewajiban, Ekuitas, pendapatan LO, beban dan Transfer menggunakan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima dan dikeluarkan oleh dan dari kas daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan BPBD DIY Tahun Anggaran 2019 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharap tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna (*steakeholder*).

Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan yang transparan, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) serta tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta,

Kepala Pelaksana

Drs. BIWARA YUSWANTANA, MSi

NIP. 19630817 198909 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
1. JUDUL.....	i
2. KATA PENGANTAR .....	ii
3. DAFTAR ISI .....	v
4. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB .....	vi
5. LAPORAN REALISASI APBD (LRA) Versi SAP (LRA64) .....	vii
6. LAPORAN REALISASI APBD (LRA) Versi APBD (LRA13) .....	viii
7. LAPORAN OPERASIOANAL (LO) .....	ix
8. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) .....	x
9. NERACA .....	xi
10. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK) .....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	2
BAB II IKHTIAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN .....	6
BAB III PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN .....	8
BAB IV PENUTUP .....	34

### LAMPIRAN

#### A. Lampiran LRA

1. Rincian LRA menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
2. Rekapitulasi LRA menurut Urusan Pemerinta Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan
3. Penjabaran LRA

#### B. Lampiran Neraca

1. Kertas Kerja Penyusutan Laporan keuangan SKPD
2. Berita Acara Penutupan Kas
3. Register Penutupan Kas
4. Berita Acara Pemeriksaan Kas

5. Register Pemeriksaan Kas
6. Rekapitulasi Belanja Barang Jasa (Pakai Habis)
7. Berita Acara Stock Opname Persediaan
8. Rekapitulasi Belanja Modal
9. Kertas Kerja Aset Tetap dan Aset Lainnya
10. Kertas Kerja Mutasi Persediaan (aplikasi) sesuai Hasil Rekon antara Pengelola Akuntansi dan Penyimpan Barang
11. Rekap Penyusutan Aset tetap dan Rekap Penyusutan Aset lainnya
12. Rincian per Jenis Aset Tetap



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Kenari No.14 A Telepon : (0274) 555836, 555585, Fax.(0274) 555326  
YOGYAKARTA 55233

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA**

Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagai terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Yogyakarta,

Kepala Pelaksana

Drs.BIWARA YUSWANTANA,MSi

NIP. 19630817 198909 1 001



**CATATAN ATAS  
LAPORAN  
KEUANGAN (CALK)**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

## 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BPBD DIY diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan BPBD DIY:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 53);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 121);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 114);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 130);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah;

22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 125) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 125 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 36);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 130);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 141);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 64) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 73).

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Bab I      Pendahuluan
  - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II     Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
  - 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
  - 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab III    Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD
  - 3.1 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD
    - 3.1.1 Pendapatan-LRA
    - 3.1.2 Belanja
    - 3.1.3 Aset
    - 3.1.4 Kewajiban
    - 3.1.5 Ekuitas
    - 3.1.6 Pendapatan-LO

3.1.7 Beban

3.1.8 Laporan Perubahan Ekuitas

Bab IV Penjelasan Atas Informasi-Informasi Nonkeuangan SKPD

Bab V Penutup

CALK BPBD DIY 2019

**BAB II**

**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Anggaran	Realisasi	Berlebih/ (berkurang)	Prosentase
	Perubahan (Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
<b>URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMIISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN</b>				
<b>BPBD DIY</b>				
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Daerah				
Hasil Retribusi Daerah				
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah				
<b>BELANJA</b>	<b>92.572.899.632,00</b>	<b>78.121.366.874,00</b>	<b>(14.451.532.758,00)</b>	<b>84,39</b> %
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>3.253.988.182,00</b>	<b>3.148.984.324,00</b>	<b>(105.003.858,00)</b>	<b>96,77</b> %
Belanja Pegawai	3.253.988.182,00	3.148.984.324,00	(105.003.858,00)	96,77 %
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>89.318.911.450,00</b>	<b>74.972.382.550,00</b>	<b>(14.346.528.900,00)</b>	<b>83,93</b> %
Program Administrasi Perkantoran	1.966.869.980,00	1.759.324.021,00	(207.545.959,00)	89,45 %
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1.351.864.000,00	1.305.429.150,00	(46.434.850,00)	96,57 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	208.384.000,00	202.383.100,00	(6.000.900,00)	97,12 %
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	6.636.573.800,00	6.366.273.703,00	(270.300.097,00)	95,93 %
Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana	8.390.397.870,00	6.441.457.900,00	(1.948.939.970,00)	76,77 %
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	70.764.821.800,00	58.897.514.676,00	(11.867.307.124,00)	82,23 %

## **2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

1. Belanja yang dianggarkan sebesar Rp92.572.899.632,00 dan realisasi sebesar Rp78.121.366.874,00 atau 84,398%
2. Secara umum pelaksanaan belanja daerah dan kinerja dapat dicapai dengan baik dan ada kendala yang dihadapi penyerapan anggaran sebesar 15,62% dikarenakan adanya sisa lelang dan kegiatan pengadaan komunikasi kebencanaan terpadu tahap II yang tidak di jalanakan karena terbentur dengan peraturan.



### BAB III

#### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN BPBD DIY

##### 3.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

		<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>1.1</b>	<b><u>Pendapatan-LRA</u></b>	<b><u>Rp0,00</u></b>	<b><u>Rp0,00</u></b>

Pendapatan-LRA BPBD DIY Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00 % dengan rincian sebagai berikut:

<b>3.1.1.1</b>	<b><u>Pendapatan Retribusi -LRA</u></b>	<b><u>Rp0,00</u></b>	<b><u>Rp0,00</u></b>
----------------	---	----------------------	----------------------

Pendapatan Retribusi-LRA BPBD DIY Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00 % dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	Rp0,00	Rp0,00	0,00
2	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa – LRA	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Jumlah	Rp0,00	Rp0,00	0,00

<b>3.1.1.2</b>	<b><u>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -LRA</u></b>	<b><u>Rp0,00</u></b>	<b><u>Rp0,00</u></b>
----------------	--	----------------------	----------------------

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA BPBD DIY Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00 % dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LRA	Rp0,00	Rp0,00	0,00
2	Pendapatan Denda Retribusi – LRA	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Jumlah	Rp0,00	Rp0,00	0,00

**3.1.2 Belanja****Rp78.121.366.874,00****Rp23.441.947.346,40**

Belanja BPBD DIY Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp92.572.899.632,00 dengan realisasi sebesar Rp78.121.366.874,00 atau 15,61% Rincian realisasi belanja terdiri dari:

**3.1.2.1 Belanja Operasi****Rp24.021.152.528,00****Rp 18.605.851.346,40**

Belanja Operasi BPBD DIY Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp26.858.737.132,00 dan realisasi sebesar Rp24.021.152.528,00 atau 89,44 %, dengan rincian sebagai berikut:

**3.1.2.1.1 Belanja Pegawai****Rp7.320.087.724,00****Rp 6.329.854.582,00**

Belanja Pegawai BPBD DIY Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp7.711.199.302,00 dan realisasi sebesar Rp7.320.087.724,00 atau 94,93 %, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan-LRA	3.253.988.182,00	3.148.984.324,00	96,77
a.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi-LRA	2.608.323.546,00	2.515.496.120,00	96,44
b.	Tunjangan Keluarga-LRA	251.406.850,00	246.284.564,00	97,96
c.	Tunjangan Jabatan-LRA	182.470.000,00	180.850.000,00	99,11
d.	Tunjangan Fungsional-LRA	0	0	0
e.	Tunjangan Fungsional Umum-LRA	85.665.000,00	83.650.000,00	97,65
f.	Tunjangan Beras-LRA	114.948.645,00	111.961.320,00	97,40
g.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus-LRA	11.128.522,00	10.707.249,00	96,21
h.	Pembulatan Gaji-LRA	45.619,00	35.071,00	76,88
	Jumlah	3.253.988.182,00	3.148.984.324,00	96,77
2.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – LRA	0	0	0
a.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Pemakaian Kekayaan Daerah-LRA	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
3.	Uang Lembur-LRA	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

4.	Honorarium PNS	767.485.000,00	723.240.000,00	94,24
	Jumlah	767.485.000,00	723.240.000,00	94,24
5.	Honorarium Non PNS	3.689.726.120,00	3.447.863.400,00	93,44
	Jumlah	3.689.726.120,00	3.447.863.400,00	93,44
	Jumlah Belanja Pegawai-LRA	Rp7.711.199.302,00	Rp7.320.087.724,00	94,93

**3.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa**

**Rp16.701.064.804,00**

**Rp 12.275.996.764,40**

Belanja Barang dan Jasa BPBD DIY Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp 19.147.537.830,00 dan realisasi sebesar Rp 16.701.064.804,00 atau 87,22 %, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	159.554.800,00	159.454.050,00	99,94
2.	Belanja Bahan/Material	3.198.000.000,00	1.613.153.148,00	50,44
3.	Belanja Jasa kantor	2.412.188.630,00	2.133.121.679,00	88,43
4.	Belanja Premi Asuransi	59.928.000,00	41.328.000,00	68,96
5.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	908.363.550,00	902.288.400,00	99,33
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	288.680.250,00	285.720.650,00	98,97
7.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	262.900.000,00	260.200.000,00	98,97
8.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	70.550.000,00	68.075.000,00	96,49
9.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	159.170.000,00	159.170.000,00	100
10.	Belanja Makanan dan Minuman	2.179.342.000,00	2.075.911.000,00	95,25
11.	Belanja Pakaian Kerja	657.507.000,00	650.551.525,00	98,94
12.	Belanja Perjalanan Dinas	1.336.343.000,00	1.131.842.587,00	84,70
13.	Belanja Pemeliharaan	353.970.000,00	316.085.500,00	89,30
14.	Belanja Jasa Konsultansi	2.284.403.300,00	2.224.312.000,00	97,37
15.	Honorarium PNS	1.012.625.000,00	967.775.000,00	95,57

16.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.804.012.300,00	3.712.076.265,00	97,58
	<b>Jumlah</b>	<b>19.147.537.830,00</b>	<b>16.701.064.804,00</b>	<b>87.22</b>

**3.1.2.2 Belanja Modal**

**Rp 54.100.214.346,00**

**Rp4.836.096.000,00**

Belanja Modal BPBD DIY Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp65.714.162.500,00 dan realisasi sebesar Rp 54.100.214.346,00 atau 82,33 %, dengan rincian sebagai berikut:

**3.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah**

**Rp0,00**

**Rp0,00**

Belanja Modal Tanah BPBD DIY Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00 %, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Modal Tanah	0	0	0
	Jumlah			

Belanja Modal Tanah tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap Tanah sebesar Rp0,00

**3.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

**Rp 1.310.972.950,00**

**Rp 3.452.003.000,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BPBD DIY Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp 1.416.855.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.310.972.950,00 atau 92,53%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	100
2.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	25.545.000,00	25.047.800,00	98,05
3.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	221.420.000,00	218.670.150,00	98,76
4.	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	99.050.000,00	98.500.000,00	99,44

5.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar	13.440.000,00	13.440.000,00	100
6.	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	1.044.400.000,00	942.315.000,00	90,23
	<b>Jumlah</b>	<b>1.416.855.000,00</b>	<b>1.310.972.950,00</b>	<b>92,53</b>

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.310.972.950,00 dan dicatat ekstrakomtabel sebesar Rp0,00

**3.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 825.104.000,00 Rp0,00**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BPBD DIY Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp999.513.000,00 dan realisasi sebesar Rp 825.104.000,00 atau 82,55 %, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	999.513.000,00	825.104.000,00	82,55
	<b>Jumlah</b>	<b>999.513.000,00</b>	<b>825.104.000,00</b>	<b>82,55</b>

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp 825.104.000,00 dan dicatat ekstrakomtabel sebesar Rp0,00

**3.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 51.964.137.396,00 Rp0,00**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BPBD DIY Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp63.297.794.500,00 dan realisasi sebesar Rp 51.964.137.396,00 atau 82,09 %, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Propinsi	47.756.583.917,25	37663976896,00	78,87
2.	Belanja Modal Pengadaan Jembatan	15.541.210.582,75	14.300.160.500,00	92,01
	<b>Jumlah</b>	<b>63.297.794.500,00</b>	<b>51.964.137.396,00</b>	<b>82,09</b>

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp 51.964.137.396,00 dan dicatat ekstrakomtabel sebesar Rp0,00

**3.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya** **Rp0,00** **Rp0,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BPBD DIY Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	-	-	-

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0,00 dan dicatat ekstrakomtabel sebesar Rp0,00

**3.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya** **Rp0,00** **Rp0,00**

Belanja Modal Aset Lainnya BPBD DIY Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00 %, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
-	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	-	-	-

Belanja Modal Aset Lainnya tersebut telah dicatat menambah Aset Tak Berwujud sebesar Rp0,00

### 3.1.3 Aset

Aset BPBD DIY per 31 Desember 2019 sebesar Rp72.042.308.192,58 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp223.759.000,00 Aset Tetap sebesar Rp71.539.474.192,58 dan Aset Lainnya sebesar Rp 279.075.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2019	2018 (Audited)
3.1.3.1 <u>Aset Lancar</u>	<u>Rp223.759.000,00</u>	<u>Rp 176.155.000,00</u>

Aset Lancar per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp223.759.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.3.1.1 <u>Kas dan Setara Kas</u>	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>
-------------------------------------	---------------	---------------

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00 tersebut merupakan pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan pada tanggal 31 Desember 2019 namun belum disetorkan ke Rekening Kas Daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00 tersebut merupakan sisa uang persediaan yang belum disetorkan kembali ke Rekening Kas Daerah dan penerimaan potongan pajak yang belum disetor ke Kas Negara.

3.1.3.1.2 <u>Piutang Pendapatan</u>	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>
-------------------------------------	---------------	---------------

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 terdiri dari Piutang Retribusi sebesar Rp0,00 dan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp0,00

Saldo Piutang Retribusi sebesar Rp0,00 terdiri dari Piutang Retribusi dan Piutang Retribusi dengan kategori sebagai berikut:

Umur Piutang	Kualitas Piutang	Jumlah
0 – 1 bulan	Lancar	Rp0,00
1 – 3 bulan	Kurang Lancar	Rp0,00
3 – 12 bulan	Diragukan	Rp0,00

>12 bulan	Macet	Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00

Saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp0,00 terdiri dari Piutang.....dan Piutang.....dengan kategori sebagai berikut:

Umur Piutang	Kualitas Piutang	Jumlah
Belum jatuh tempo	Lancar	Rp0,00
1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	Kurang Lancar	Rp0,00
1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Diragukan	Rp0,00
1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara	Macet	Rp0,00
	Jumlah	Rp0,00

**Piutang Lainnya**

**Rp0,00**

**Rp0,00**

**3.1.3.1.3**

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 terdiri dari Piutang ... sebesar Rp0,00 dan Piutang .... sebesar Rp0,00

**3.1.3.1.4 Penyisihan Piutang**

**Rp0,00**

**Rp0,00**

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 terdiri dari Penyisihan Piutang Pendapatan sebesar Rp0,00 dan Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Prosentase	Jumlah Piutang	Jumlah Penyisihan Piutang
Lancar	0,5% (nol koma lima persen)	Rp0,00	Rp0,00
Kurang Lancar	10% (sepuluh persen)	Rp0,00	Rp0,00
Diragukan	50% (lima puluh persen)	Rp0,00	Rp0,00
Macet	100% (seratus persen)	Rp0,00	Rp0,00
Jumlah		Rp0,00	Rp0,00



**3.1.3.1.5 Persediaan****Rp 223.759.000,00****Rp. 176.155.000,00**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 223.759.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	<u>Uraian</u>	2019
1.	Barang Konsumsi	Rp15.013.300,00
2.	Pita Cukai dan Leges	Rp2.250.000,00
3.	Bahan Baku	Rp184.580.000,00
3.	Persediaan untuk urusan strategis	Rp21.915.700,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 223.759.000,00</b>

**3.1.3.2 Aset Tetap****Rp 71.539.474.192,58****Rp 20.553.549.621,01**

Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp71.539.474.192,58 dengan rincian sebagai berikut

**3.1.3.2.1 Tanah****Rp0,00****Rp0,00**

Saldo Tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 berasal dari saldo awal setelah penyesuaian sebesar Rp0,00 ditambah dengan hasil pengadaan Tahun 2019 sebesar Rp0,00 sehingga saldo per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	<u>Uraian</u>	2019
	Tanah Perkampungan	-
	Tanah Pertanian	-
	Tanah Perkebunan	-
	Kebun Campuran	-
	Hutan	-
	Kolam Ikan	-
	Dana/Rawa	-
	Tanah Tandus/Rusak	-
	Alang-alang dan Padang Rumput	-
	Tanah Pengguna Lain	-

	Tanah Untuk Bangunan Gedung	-
	Tanah Pertambangan	-
	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	-
	<b>Jumlah</b>	-

**3.1.3.2.2 Peralatan dan Mesin**

**Rp25.437.267.583,00**

**Rp25.357.189.633,00**

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp25.437.267.583,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp273.342.950,00 berasal dari penambahan Alat-alat Pengadaan Alat Bengkel bermesin Rp.44.385.000,00 Pengadaan Alat Kantor Rp13.000.000,00 Pengadaan Alat Rumah Tangga Rp28.308.200,00 Pengadaan Personal Komputer Rp75.709.750,00 Pengadaan Alat Komunikasi Rp98.500.000,00 dan Pengadaan Peralatan Pemancar Rp13.440.000,00

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang Peralatan dan Mesin sebesar Rp193,265,000,00 terdiri dari mutasi kurang dari Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp10.300.000,00 Mesin Proses Rp43.760.000,00 Personal Komputer Rp. 16.885.000,00 Alat Komunikasi Telephone Rp. 22.855.000,00 Photo dan Film Equipment Rp. 74.525.000,00 dan Unit-unit laboratorium Rp.24.940.000,00

c. Ekstrakomtabel

Hasil pengadaan Peralatan dan Mesin Tahun 2019 yang disajikan sebagai aset ekstrakomtabel adalah sebesar Rp0,00 yang terdiri dari Alat Rumah Tangga sebesar Rp0,00 dan Komputer sebesar Rp0,00.

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp Rp25.437.267.583,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2019
	Peralatan dan Mesin	Rp25.437.267.583,00
1	Alat-alat Besar Darat	Rp826.397.840,00
2	Alat-alat Besar Apung	Rp0,00
3	Alat-alat Bantu	Rp2.409.085.578,00
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp14.950.617.849,00
5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	Rp26.799.000,00

6	Alat Angkut Apung Bermotor	Rp0,00
7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	Rp0,00
8	Alat Angkut Bermotor Udara	Rp0,00
9	Alat Bengkel Bermesin	Rp48.365.000,00
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp125.139.000,00
11	Alat Ukur	Rp17.350.000,00
12	Alat Pengolahan	Rp0,00
13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	Rp0,00
14	Alat Kantor	Rp675.894.800,00
15	Alat Rumah Tangga	Rp1.949.112.021,00
16	Komputer	Rp1.458.721.395,00
17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Rp706.081.000,00
18	Alat Studio	Rp753.183.200,00
19	Alat Komunikasi	Rp833.425.000,00
20	Peralatan Pemancar	Rp100.940.000,00
21	Alat Kedokteran	Rp18.600.000,00
22	Alat Kesehatan	Rp44.907.500,00
23	Unit-Unit Laboratorium	Rp0,00
24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	Rp0,00
25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Rp0,00
26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Rp0,00
27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Rp0,00
28	Radioation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	Rp0,00
29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp0,00
30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	Rp0,00
31	Senjata Api	Rp67.200.000,00
32	Persenjataan Non Senjata Api	Rp425.448.400,00
33	Amunisi	Rp0,00
34	Alat Keamanan dan Perlindungan	Rp0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp25.437.267.583,00</b>

**3.1.3.2.3 Gedung dan Bangunan****Rp9.388.974.350,00****Rp9.339.974.350,00**

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.388.974.350,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

## a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan sebesar Rp49.000.000,00, berasal dari hasil pengadaan melalui Belanja Modal selama Tahun 2019 sebesar Rp49.000.000,00, kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp0,00 dan pelimpahan dari SKPD lain sebesar Rp0,00

## b. Mutasi kurang

Mutasi kurang Gedung dan Bangunan sebesar Rp0,00 terdiri dari reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp0,00 reklasifikasi ke Aset Lainnya-Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp0,00, penghapusan sebesar Rp0,00 dan penyerahan ke SKPD lain sebesar Rp0,00

## c. Penerimaan hibah

Penerimaan hibah sebesar Rp0,00

## d. Ekstrakomtabel

Hasil pengadaan Gedung dan Bangunan Tahun 2019 yang disajikan sebagai aset ekstrakomtabel adalah sebesar Rp0,00

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp9.388.974.350,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2019
1	Bangunan Gedung	
2	Bangunan Monumen	
3	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp9.308.799.350,00
4	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Rp0,00
5	Bangunan Menara	
6	Bangunan Bersejarah	
7	Tugu Peringatan	
8	Candi	
9	Monumen/Bangunan Bersejarah	
10	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
11	Rambu-Rambu	Rp80.175.000,00
12	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp9.388.974.350,00</b>

**3.1.3.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan****Rp6.218.950.800,00****Rp5.321.020.800,00**

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.218.950.800,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

## a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp897.930.000,00 berasal dari hasil pengadaan melalui Belanja Modal Instalasi Pengaman Tahun 2019 sebesar Rp897.930.000,00 kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp0,00 dan pelimpahan dari SKPD lain sebesar Rp0,00

## b. Mutasi kurang

Mutasi kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp0,00 terdiri dari reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp0,00 reklasifikasi ke Aset Lainnya-Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp0,00, penghapusan sebesar Rp0,00 dan penyerahan ke SKPD lain sebesar Rp0,00

## c. Penerimaan hibah

Penerimaan hibah sebesar Rp0,00

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp6.218.950.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2019
1	Jalan	Rp101.175.000,00
2	Jembatan	Rp1.384.093.000,00
3	Bangunan Air Irigasi	Rp0,00
4	Bangunan Air Pasang Surut	Rp0,00
5	Bangunan Air Rawa	Rp0,00
6	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	Rp0,00
7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Rp0,00
8	Bangunan Air Bersih/Baku	Rp0,00
9	Bangunan Air Kotor	Rp0,00
10	Bangunan Air	Rp0,00
11	Instalasi Air Minum Bersih	Rp1.000.000,00
12	Instalasi Air Kotor	Rp0,00
13	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	Rp0,00
14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Rp0,00
15	Instalasi Pembangkit Listrik	Rp0,00
16	Instalasi Gardu Listrik	Rp0,00

17	Instalasi Pertahanan	Rp40.850.000,00
18	Instalasi Gas	Rp0,00
19	Instalasi Pengaman	Rp4.364.332.000,00
20	Jaringan Air Minum	Rp6.400.000,00
21	Jaringan Listrik	Rp312.100.800,00
22	Jaringan Telepon	Rp9.000.000,00
23	Jaringan Gas	Rp0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp6.218.950.800,00</b>

**3.1.3.2.5 Aset Tetap Lainnya** **Rp52.819.709.396,00** **Rp54.528.000,00**

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp52.819.709.396,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah  
Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp52.765.181.396,00 berasal dari hasil pengadaan melalui Belanja Modal Barang Bercorak Kebudayaan selama Tahun 2019 sebesar Rp24.940.000,00 Aset Tetap Renovasi sebesar Rp52.740.241.396,00 dan pelimpahan dari SKPD lain sebesar Rp0,00
- b. Mutasi kurang  
Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0,00 terdiri dari reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp0,00 reklasifikasi ke Aset Lainnya-Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebesar Rp0,00, penghapusan sebesar Rp0,00 dan penyerahan ke SKPD lain sebesar Rp0,00
- c. Penerimaan hibah  
Penerimaan hibah sebesar Rp0,00

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp52.819.709.396,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2019
1	Buku	Rp20.566.500,00
2	Terbitan	
3	Barang-Barang Perpustakaan	Rp33.961.500,00
4	Barang Bercorak Kebudayaan	Rp24.940.000,00
5	Alat Olah Raga Lainnya	
6	Hewan	
7	Tanaman	
8	Aset Tetap Renovasi	Rp52.740.241.396,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp52.819.709.396,00</b>

3.1.3.2.6 **Konstruksi Dalam Pengerjaan** **Rp0,00** **Rp0,00**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah  
Mutasi tambah KDP sebesar Rp0,00 berasal dari hasil pengadaan melalui Belanja Modal selama Tahun 2016 sebesar Rp0,00
- b. Mutasi kurang  
Mutasi kurang KDP sebesar Rp0,00

**3.1.3.2.7 Akumulasi Penyusutan****Rp22.325.427.936,42****Rp19.519.163.161,99**

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 sebesar Rp22.325.427.936,42 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	20.494.882.508,42
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.326.742.903,00
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	503.802.525,00
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-
	<b>Jumlah</b>	<b>22.325.427.936,42</b>

**3.1.3.3 Aset Lainnya****Rp279.075.000,00****Rp64.850.000,00**

Aset Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp279.075.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

**3.1.3.3.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga****Rp0,00****Rp0,00**

Rincian Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga – Sewa	-
2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga – Bangun Guna Serah	-
3	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga – Pinjam Pakai	-
4	Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>



**3.1.3.3.3 Aset Tak Berwujud****Rp204.550.000,00****Rp64.850.000,00**

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp204.550.000,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

## a. Mutasi tambah

Mutasi tambah ATB sebesar Rp139.700.000,00 berasal dari hasil pengadaan melalui Belanja Modal Website selama Tahun 2019 sebesar Rp139.700.000,00, kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp0,00 dan pelimpahan dari SKPD lain sebesar Rp0,00

## b. Mutasi kurang

Mutasi kurang ATB sebesar Rp0,00 terdiri dari reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp0,00 penghapusan sebesar Rp0,00 dan penyerahan ke SKPD lain sebesar Rp0,00

## c. Penerimaan hibah

Penerimaan hibah sebesar Rp0,00

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo ATB per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp204.550.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Aset Tak Berwujud Lainnya	Rp204.550.000,00
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp204.550.000,00</b>

Saldo Aset Tak Berwujud sebesar Rp204.550.000,00 berupa Software Rp.34.975.000,00 dan website Rp.169.575.000,00

**3.1.3.3.4 Aset Lain-lain****Rp74.525.000,00****Rp0,00**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

## a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Aset Lain-lain sebesar Rp168.325.000,00 terdiri dari mutasi tambah dari Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp10.300.000,00 Mesin Proses Rp43.760.000,00 Personal Komputer Rp. 16.885.000,00 Alat Komunikasi Telephone Rp. 22.855.000,00 dan Photo dan Film Equipment Rp. 74.525.000,00

- Reklass dari peralatan mesin berupa :
  - 1 Alat Rumah Tangga lainnya Rp10.300.000,00
  - 2 Mesin Proses Rp43.760.000,00
  - 3 Personal Komputer Rp16.885.000,00
  - 4 Alat Komunikasi Telephone Rp.22.855.000,00
  - 5 Photo dan Film Equipment Rp.74.525.000,00
- Akumulasi asset yang diusulkan penghapusan Rp.93.800.000,00

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang ALL sebesar Rp0,00 terdiri dari reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar Rp0,00 penghapusan sebesar Rp0,00 dan penyerahan ke SKPD lain sebesar Rp0,00

c. Penerimaan hibah

Penerimaan hibah sebesar Rp0,00

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp168.325.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Aset Lain-lain	Rp168.325.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp168.325.000,00</b>

Saldo Aset Lain-lain sebesar Rp168.325.000,00

**3.1.4 Kewajiban Rp32.605.057,00 Rp43.079.724,00**

Kewajiban per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp32.605.057,00 dengan rincian sebagai berikut:

**3.1.4.1 Kewajiban Jangka Pendek Rp32.605.057,00 Rp43.079.724,00**

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp32.605.057,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.4.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Rp0,00 Rp0,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2019 merupakan utang atas penerimaan potongan pihak ketiga yang sampai dengan 31 Desember 2019 belum diserahkan kepada pihak ketiga terkait meliputi Utang Pajak sebesar Rp0,00

3.1.4.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka Rp0,00 Rp0,00

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 merupakan penerimaan pembayaran dari Pihak Ketiga atas penggunaan aset daerah yang tidak dipisahkan namun sampai dengan per 31 Desember 2019 layanan/jasa belum dinikmati oleh pihak ketiga tersebut sebesar Rp0,00

3.1.4.1.3 Utang Belanja Rp32.605.057,00 Rp43.079.724,00

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2019 merupakan kewajiban atas layanan barang/jasa yang telah dikonsumsi oleh SKPD namun sampai dengan dengan per 31 Desember 2019 belum dibayar oleh SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Utang Belanja Pegawai	0
2	Utang Belanja Jasa	Rp32.605.057,00
3	Utang Belanja Modal	-
4	Dst	-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp32.605.057,00</b>

3.1.4.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0,00 Rp0,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 merupakan kewajiban SKPD selain Utang PFK, Pendapatan Diterima Dimuka dan Utang Belanja yang sampai dengan dengan per 31 Desember 2019 belum dibayar oleh SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	-	-
2	-	-
	<b>Jumlah</b>	

**1.5 Ekuitas**

**Rp72.009.703.135,58**

**Rp20.751.474.897,01**

Saldo Ekuitas sebesar Rp72.009.703.135,58 merupakan kekayaan bersih SKPD yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban SKPD pada tanggal 31 Desember 2019. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
	Ekuitas awal	20.751.474.897,01
	Surplus Defisit – LO	(26.895.680.299,43)
	Ekuitas SAL	
	Ekuitas Dikonsolidasikan:	
	RK PPKD	78.121.366.874,00
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	32.541.664,00
	<b>Jumlah</b>	<b>72.009.703.135,58</b>

**2019**

**3.1.6 Pendapatan-LO**

**Rp0,00**

Pendapatan LO Tahun 2019 sebesar Rp0,00 meliputi Pendapatan Retribusi-LO sebesar Rp0,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

**3.1.6.1 Pendapatan Retribusi-LO****Rp0,00**

Realisasi Pendapatan Retribusi-LO pada Tahun 2019 sebesar Rp0,00 terdiri dari Pendapatan Retribusi-LO yang telah diterima secara kas dan telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp0,00, diterima oleh Bendahara Penerimaan pada akhir Tahun 2019 namun belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp0,00 dan Piutang Retribusi yang telah ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah tetapi belum dibayar oleh wajib pajak sebesar Rp0,00

Rincian Pendapatan Retribusi-LO adalah sebagai berikut:

No	<u>Uraian</u>	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	Rp0,00
2.	.....	
	<b>Jumlah</b>	

**3.1.6.2 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -LO****Rp0,00**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO pada Tahun 2019 sebesar Rp0,00 terdiri dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO yang telah diterima secara kas dan telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp0,00, diterima oleh Bendahara Penerimaan pada akhir Tahun 2019 namun belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp0,00 dan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang telah ditetapkan dengan Surat Ketetapan tetapi belum dibayar oleh wajib pajak sebesar Rp0,00

Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO adalah sebagai berikut:

No	<u>Uraian</u>	2019
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	Rp0,00
2.	.....	
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp0,00</b>

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>3.1.7 <u>Beban</u></b>	<b><u>Rp26.895.680.299,43</u></b>	<b><u>Rp21.514.850.099,04</u></b>

Realisasi Beban BPBD DIY Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp26.895.680.299,43 adalah penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2019, dengan rincian sebagai berikut:

<b>3.1.7.1 <u>Beban Operasi</u></b>	<b><u>Rp26.895.680.299,43</u></b>	<b><u>Rp21.514.850.099,04</u></b>
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Realisasi Beban Operasi BPBD DIY Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp26.895.680.299,43 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp7.320.087.724,00 Beban Barang dan Jasa sebesar Rp16.642.986.137,00, Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp2.932.606.438,43, Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp0,00 dan Beban Lain-lain sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

<b>3.1.7.1.1 <u>Beban Pegawai</u></b>	<b><u>Rp7.320.087.724,00</u></b>	<b><u>Rp6.329.854.582,00</u></b>
---------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Realisasi Beban Pegawai BPBD DIY Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.320.087.724,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi
1.	Beban Gaji dan Tunjangan	3.148.984.324,00
a.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.515.496.120,00
b.	Tunjangan Keluarga	246.284.564,00
c.	Tunjangan Jabatan	180.850.000,00
d.	Tunjangan Fungsional	0
e.	Tunjangan Fungsional Umum	83.650.000,00
f.	Tunjangan Beras	111.961.320,00
g.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.707.249,00
h.	Pembulatan Gaji	35.071,00
	Jumlah	3.148.984.324,00

2.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0
a.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Pemakaian Kekayaan Daerah	0
	Jumlah	0
3.	Uang Lembur	0
	Jumlah	0
4.	Honorarium PNS	723.240.000,00
	Jumlah	723.240.000,00
5.	Honorarium Non PNS	3.447.863.400,00
	Jumlah	3.447.863.400,00
	<b>Jumlah Beban Pegawai</b>	<b>7.320.087.724,00</b>

**3.1.7.1.2 Beban Barang dan Jasa**

**Rp16.642.986.137,00**

**Rp12.054.176.305,40**

Realisasi Beban Barang dan Jasa BPBD DIY Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp16.642.986.137,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi
1	Beban Persediaan Bahan Pakai Habis	670.679.050,00
2	Beban Persediaan Bahan/Material	2.120.291.673,00
3	Beban Jasa Kantor	2.122.647.012,00
4	Beban Premi Asuransi	41.328.000,00
5	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	468.425.400,00
6	Beban Persediaan Cetak dan Penggandaan	304.167.650,00
7	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	260.200.000,00
8	Beban Sewa Sarana Mobilitas	68.075.000,00
9	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	159.170.000,00

10	Beban Makanan dan Minuman	2.075.911.000,00
11	Beban Pakaian Kerja	0,00
12	Beban Perjalanan Dinas	1.131.842.587,00
11	Beban Pemeliharaan	316.085.500,00
12	Beban Jasa Konsultasi	2.224.312.000,00
13	Beban Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.712.076.265,00
14	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	967.775.000,00
15	Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>16.642.986.137,00</b>

**3.1.7.1.3      Beban Penyusutan dan Amortisasi      Rp2.932.606.438,43      Rp3.130.819.211,64**

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi BPBD DIY Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.932.606.438,43 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.525.078.515,75
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	185.440.987,00
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	222.086.935,68
4.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-
5.	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-
6.	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-
7.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-
	<b>Jumlah</b>	<b>2.932.606.438,43</b>



**3.1.7.1.4 Beban Penyisihan Piutang****Rp0,00**

Realisasi Beban Penyisihan Piutang BPBD DIY Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi
1.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	-
2.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-
	<b>Jumlah</b>	-

**3.1.7.1.5 Beban Lain-lain****Rp0,00**

Realisasi Beban Lain-lain BPBD DIY Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi
1.	Beban Penurunan Nilai Investasi	-
2.	Beban Penyisihan Dana Bergulir	-
3.	Beban Lain-lain	Rp0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp0,00</b>

**3.1.7.2 Surplus/Defisit Kegiatan Operasional –LO****Rp(26.895.680.299,43)**

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional -LO sebesar Rp(26.895.680.299,43) berasal dari Pendapatan-LO sebesar Rp0,00 dikurangi Beban sebesar Rp26.895.680.299,43

**3.1.8 Laporan Perubahan Ekuitas**

Saldo Ekuitas sebesar Rp72.009.703.135,58 merupakan kekayaan bersih SKPD yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban SKPD pada tanggal 31 Desember 2019. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
	Ekuitas awal	20.751.474.897,01
	Surplus Defisit – LO	(26.895.680.299,43)
	Ekuitas SAL	
	Ekuitas Dikonsolidasikan:	
	RK PPKD	78.121.366.874,00
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	32.541.664,00
	<b>Jumlah</b>	<b>72.009.703.135,58</b>

Dampak sebesar Rp.32.541.664,00 terdiri dari jurnal penyesuaian LO akumulasi penyusuran sebesar Rp.7.700.000,00 dan Penyesuaian akumulasi hidrodinamika sebesar Rp.24.841.664,00

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Keuangan BPBD DIY Tahun 2019 merupakan laporan keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang selambat-lambatnya harus diterapkan pada Tahun 2015.

Laporan Keuangan BPBD DIY Tahun 2019 disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Untuk penyajian aset tetap di neraca didukung dengan SIPKD Modul Aset.

Perencanaan anggaran BPBD DIY Tahun Anggaran 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan dalam pelaporan kode rekening pendapatan dan belanja yang digunakan dalam penganggaran dikonversi sesuai dengan Bagan Akun Standar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun 2019 yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPBD DIY untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

Yogyakarta,

**KEPALA PELAKSANA**

TTD

**Drs. BIWARA YUSWANTANA, M.Si**

**NIP.19630817 198909 1 001**

CALK BPBD DIY 2019